

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.1.2 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut PP No. 71 (2010:1) kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi:

- 1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah.

Terjadinya pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

2.1.3 Lingkungan Akuntansi Pemerintah

Menurut PP No. 71 (2010: 2) lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintah:

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :
 - 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - 3) Adanya pengaruh proses politik
 - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah.
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya
 - 2) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
 - 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

2.2 Pendidikan

Berdasarkan UU dan PP RI tentang pendidikan Tahun 2006 (pasal 1 : 5) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Rajana (2009) ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu:

- a. Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu departemen pendidikan nasional, dinas pendidikan daerah dan juga sekolah yang berada digaris depan dalam hal ini interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
- b. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

2.3 Pelatihan

Penelitian Atika (2013) dalam Peraturan MENPAN No. PER/66/M.PAN/6/2005 (pasal 1 : 72) pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan

tertentu. Terdapat beberapa pengertian dari pelatihan yang digunakan mendefinisikan pelatihan (*training*). Diantaranya adalah:

- 1) Menurut Cross (2007), “pelatihan (*training*) diukur dari apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan masa pelatihan itu. Training adalah melakukan training meningkatkan performance”.
- 2) Menurut Miarso (2007), “pelatihan adalah peningkatan kemampuan secara khusus dalam suatu lingkaran kerja.

Dengan diadakannya pelatihan, diharapkan para pegawai lebih memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk bagaimana membangun kerja sama dengan rekan kerjanya berkenaan dengan penyelesaian tugasnya.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu kepada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2009: 18) dalam Beti, Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Semua instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memahami lingkungan akuntabilitas masing-masing. Akuntabilitas dapat mencakup aspek pribadi dan aspek eksternal.

Penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Sedarmayanti (2009: 108)

- 1) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
- 4) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.5 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004 : 30) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. . Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut simson (2005) Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah.
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait dengan aktivitas publik. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

2.6 Penyusunan Laporan Keuangan

2.6.1 Pengertian laporan keuangan

Menurut PP No. 71 1.02 (2010 : 6) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara *spesifik* tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.6.2 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 (2010 : 8) Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten terdiri dari laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsure-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau terinci dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.6.3 Peranan Pelaporan Keuangan

Menurut PP No. 71 (2010 : 7) Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) **Evalusi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.6.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 (2010 : 7) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,

surplus/deficit-laporan operasional (LO), asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.6.5 Dasar Hukum Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 (2010 : 8) Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- 2) Undang-undang dibidang keuangan Negara;
- 3) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah khususnya yang mengatur keuangan;
- 5) Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 6) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/daerah.
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.6.6 Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

Menurut PP No. 71 (2010 : 9) juga dijelaskan mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar tersebut kemandirian entitas, asumi kesinambungan entita, asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary meansurement*).

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

b. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2.7 Opini audit

2.7.1 Pengertian Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan

pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

2.7.2 Jenis – Jenis Audit

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar.

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan.

d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

e. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yohanes (2008)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Latar Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada	Independen Variabel: Pemahaman SAP, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Latar Belakang Pendidikan. Dependen Variabel: Penyusunan	Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Tidak Mempunyai Pengaruh yang Signifikan serta Memiliki Hubungan yang Negatif, Sedangkan Latar Belakang Pendidikan

		Pemerintah Kota Medan.	Laporan Keuangan	Mempunyai Hubungan yang Positif Namun tidak Mempunyai Pengaruh yang Signifikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan.
2.	Junita Putri Rajana (2009)	Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Kota Pematangsiantar	Independen Variabel: Pemahaman SAP, Pendidikan, Dan Pelatihan Serta Latar Belakang Pendidikan Dan Strata Pendidikan Dependen Variabel: Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	Pemahaman SAP, Latar Belakang, Strata Pendidikan dan Pelatihan Tidak Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan Serta Memiliki Hubungan yang Negatif, Sedangkan Strata Pendidikan Dan Pelatihan Mempunyai Hubungan yang Positif Namun Tidak Mempunyai Pengaruh yang Signifikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
3.	Beti Rahim (2012)	Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan	Independen Variabel: Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan Serta Akuntabilitas.	Pemahaman SAP Berpengaruh Signifikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan,

		Laporan Keuangan Skpd pemerintahan Kabupaten Bengkalis	Dependen Variabel: Penyusunan Laporan Keuangan	Sedangkan Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
4.	Elda Sofia Maryanti (2008)	Pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah	Independen Variabel : desentralisasi fiskal dan transparansi Dependen variable : Pengelolaan laporan keuangan daerah	Desentralisasifiskal an berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada kantor dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) kota di Sumatera Barat dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada DPKD kota di sumatera barat

Sumber : Penelitian Terdahulu

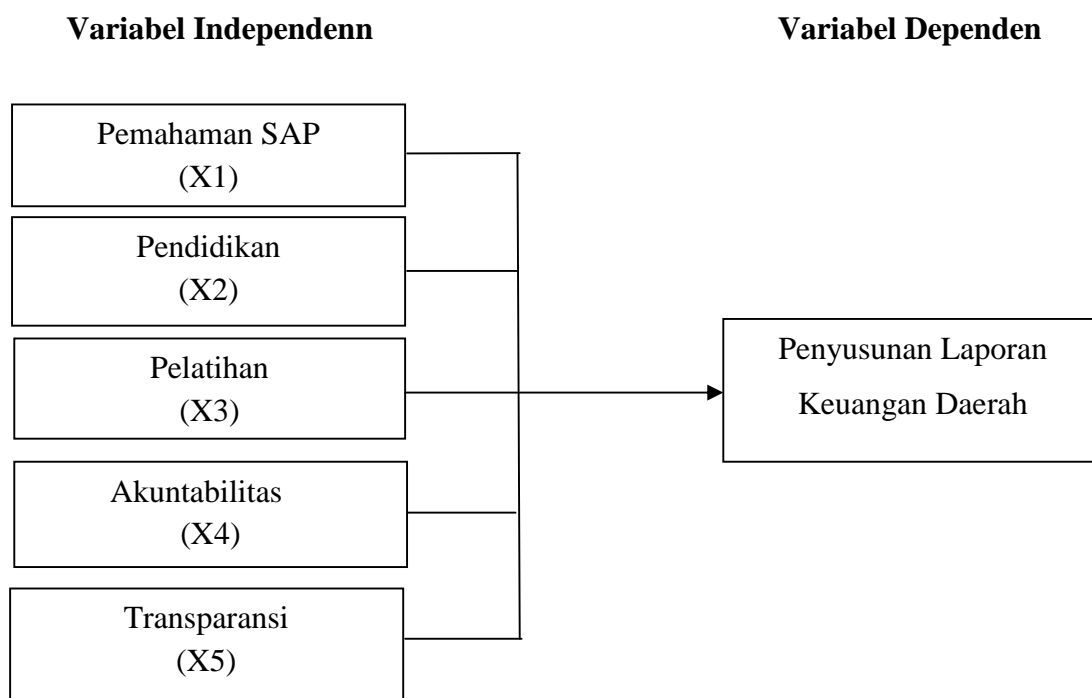
2.9 Kerangka Konseptual

Pada penelitian kali ini model yang dibangun berdasarkan model yang dikembangkan oleh Yohanes (2008) dalam Junita Putri Rajana (2009), Beti Rahim (2012). Penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas serta Transparansi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Gambar 2.1

Model Penelitian



2.10 Hipotesis

Menurut Kerlinger (2006) yang terdapat dalam Sangadji dan Sopiah (2010:90) mendefenisikan “hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaah toeritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris.

Sesuai dengan PP No. 71 pada bagian “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Namun Roesyanto (2007) menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Dalam penelitian yang dilakukan Beti Rahim (2012), menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan temuan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Diduga pemahaman SAP dan transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan UU dan PP RI tentang pendidikan tahun 2006 (pasal 1:5) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Junita Putri Rajana (2009), menyatakan bahwa pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif.

Penelitian yang dilakukan Yohanes (2008), menyatakan bahwa pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Beti Rahim (2012), menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan temuan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Diduga pendidikan, pelatihan dan akuntabilitas berpengaruh negatif secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Pelalawan

2.11 Pandangan Islam

Al-Baqarah²⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَوِيعًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَخِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَقُّ إِلَّا تَرَابًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْءٌ عَلَيْهِ ^(٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.